

KAIN ULOS TEMBUS PASAR INTERNATIONAL

Perajin menyelesaikan pembuatan kain tenun tradisional Ulos di Galeri Ulos Sianipar, Medan Denai, Sumatera Utara, Jumat (6/1). Pemasaran kain Ulos yang merupakan kain tradisional suku Batak tersebut saat ini telah menembus pasar internasional seperti Amerika, Jerman dan Malaysia dengan harga jual Rp15 ribu hingga Rp6 juta per lembar tergantung motif dan bahan yang digunakan.



FOTO: ANTARA

BTN Didorong Lipatgandakan Pembiayaan Properti

Dalam 5 tahun terakhir, BTN mampu menyalurkan kredit perumahan pada 800.000 unit properti. Setelah adanya penambahan modal, BTN diperkirakan dapat membiayai hingga 1,32 juta unit rumah.

JAKARTA (IM) - Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melipatgandakan pembiayaan properti setelah bank pelat merah tersebut meraih dana Rp4,13 triliun dari *rights issue*. Erick mengatakan hasil

rights issue itu akan memperkuat permodalan BTN. Dengan penambahan modal tersebut, BTN dapat melipatgandakan kemampuan pembiayaan perumahan. "Dengan demikian, BTN semakin sehat dan semakin memiliki energi untuk terus

ekspansi," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari *Antara*, Jumat (6/1).

BTN sukses meraup dana segar sebesar Rp4,13 triliun. Dana ini diperoleh dari hasil penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau *rights issue*.

Aksi korporasi ini terbilang sukses, karena pemegang saham publik langsung memesan hingga melampaui target awal atau *oversubscribe* sebesar 1,6 kali.

Dalam 5 tahun terakhir, BTN mampu menyalurkan kredit perumahan pada 800.000 unit properti. Setelah adanya penambahan modal, BTN diperkirakan dapat membiayai hingga 1,32 juta unit rumah.

Erick mengatakan *oversubscribe right issue* BTN merupakan bukti kepercayaan publik pada masa depan bank tersebut.

Sumber dana dari *right issue* juga menunjukkan kualitas permodalan BTN menjadi semakin tinggi karena bank ini tidak menggantung diri pada utang.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargo mengatakan bahwa hasil *rights issue* itu patut disyukuri.

"Kami sangat bersyukur, proses *right issue* BTN berjalan lancar. Jumlah permintaan yang masuk juga sangat tinggi, sehingga *right issue* BTN ini mengalami *oversubscribe* sekitar 1,6 kali," ujar Haru.

Dalam aksi korporasinya, BTN menerbitkan 3,44 miliar saham baru seri B yang setara dengan 24,54 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan harga pelaksanaan Rp1.200, perseroan akan mendapatkan tambahan modal sebesar Rp4,13 triliun setelah aksi korporasi ini selesai

Haru menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham publik, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya yang telah mendukung kelancaran dan kesuksesan proses *rights issue* perseroan.

"Kelebihan permintaan *rights issue* Bank BTN merupakan kepercayaan yang besar dari para pemegang saham Bank BTN terhadap kinerja perseroan," katanya.

Dia menambahkan BTN akan menjaga kepercayaan para pemegang saham dengan menghasilkan kinerja yang terus bertumbuh positif dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. BTN juga akan memperbesar kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan BTN, dari sebelumnya 800 ribu unit selama lima tahun menjadi 1,32 juta unit. ● **hen**

Langkah Strategis Kemenperin Dorong SDM Kompeten di Era Digital

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan industri, di antaranya melalui pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Langkah tersebut dilakukan seiring terus meningkatnya kebutuhan tenaga kerja industri di tanah air.

Pada 2024 diperkirakan dibutuhkan sebanyak 20,21 juta orang, atau bertambah rata-rata sekitar 682 ribu pekerja per tahun selama periode tahun 2021-2024.

"Peran SDM dalam pembangunan industri ini sangat krusial, dengan adanya perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, diperkirakan akan banyak pekerjaan baru membutuhkan skill khusus yang jumlahnya lebih banyak dibanding pekerjaan hilang akibat penerapan teknologi otomatisasi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan di Jakarta, dikutip dari laman Kemenperin, Jumat (6/1).

Agar tenaga kerja industri di Indonesia memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, BPSDMI Kemenperin setiap tahunnya aktif menyiapkan infrastruktur kompetensi SDM Industri, salah satunya melalui pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pengembangan SKKNI dan KKNI memiliki peran yang vital dalam pembangunan SDM industri di tanah air. SKKNI merupakan dokumen rumusan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kompetensi.

Menurutnya, rumusan kemampuan ini akan menjadi kriteria yang jelas terkait aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang perlu menjadi materi pembelajaran dalam pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan juga materi uji kompetensi dalam kegiatan uji kompetensi. Adapun KKNI adalah dokumen yang berisi pen-

tapan jenjang kualifikasi kompetensi dan pengemasan kompetensi dari jabatan kerja (okupasi).

KKNI akan menjadi gambaran profil okupasi di industri dan juga profil lulusan pendidikan/pelatihan sehingga memberi rujukan yang jelas dalam membangun program pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan juga skema uji kompetensinya.

"Melalui pengembangan SKKNI dan KKNI, diharapkan tidak ada kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia. Dengan demikian, kemampuan lulusan lembaga pendidikan/pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan para lulusan nantinya juga dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)," ujarnya.

Pada tahun 2022, BPSDMI Kemenperin memfasilitasi penyusunan tujuh dokumen Rancangan SKKNI dan tiga dokumen Rancangan KKNI. SKKNI yang telah disusun antara lain Manufaktur Otomotif Roda Empat, Jigs and Fixtures, Furnitur Alat Kesehatan, Sarung Tangan Kulit, Servis Kendaraan Listrik, Rekayasa Nano Material, dan Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Kemenperin juga telah menyusun KKNI Perajutan Tekstil, Industri Serat Stapel Rayon Viskosa, dan Industri Serat Sintetis Pemintalan Leleh.

"Penyusunan SKKNI yang telah melibatkan banyak pihak diharapkan dapat mengurangi permasalahan mismatch antara *supply and demand* penyediaan SDM industri yang selama ini terjadi di Indonesia," imbuhnya.

Tim Perumus dalam penyusunan SKKNI dan KKNI terdiri dari praktisi dari perusahaan industri, akademisi, perwakilan asosiasi industri, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Penetapan dokumen SKKNI akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dokumen KKNI akan dilakukan oleh K/L pembina sektor yang dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian. ● **dro**

Empat Emiten Melantai di Bursa

JAKARTA (IM) - Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan empat emiten baru sekaligus untuk melantai. Mulai dari BEER, SOUL, ELIT dan CBPE, emiten tersebut dinilai cukup menarik dari prospek bisnis.

President Director CSA Institute Aria Santoso mengatakan semua emiten menarik karena semua perusahaan yang IPO menawarkan prospek bisnis ke depan.

Kalau kita melihat memang ada keunikan masing-masing dari semua emiten yang melantai hari ini seperti contohnya BEER, industri liquor di Indonesia nggak terlalu banyak yang sudah IPO, tetapi produknya malah bukan beer ada soju dan cap tikus," ujar Aria dalam segmen Market Buzz Power Breakfast IDX, Jumat (6/1).

Adapun saham produsen Daebak Soju dan Cap Tikus ini, PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER), menurut Aria memiliki keunikan dari segi *hyped market* yang cocok dengan

industri itu cukup besar dan tidak terlalu banyak pilihan.

Kemudian yang berhubungan dengan teknologi, PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT) juga punya prospek cukup besar karena minat digitalisasi semakin membaik.

Aria mengatakan, sektor properti berpeluang bagus tahun ini dilihat dari performa yang baik atau tidak, mampu menghadapi tantangan yang sekarang terjadi dan emiten PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) dirasa mampu. "Kita lihat dua kuartal kedepan untuk mencapai *equilibriumnya* ada *demand and supply* di market," kata Aria.

Emiten terakhir ada PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) dilihat Aria bahwa air mineral akan selalu diminati oleh market.

Aria menilai semua emiten yang melantai hari ini punya prospektif cukup bagus. Hanya saja minat dari *market* untuk BEER segmennya lebih spesifik.

"Tapi semuanya cukup punya prospek dan kita perlu melihat yang jangka

pendek bagaimana momentum euforia di awal ya, itu boleh dimanfaatkan," ujar Aria.

Khusus untuk PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE), perseroan melepas 271,25 juta saham atau mewakili 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Direktur Citra Buana Prasida Didi Omara mengatakan, CBPE akan memakai dana IPO untuk modal kerja perseroan yaitu membangun 33 ruko pada Blok N dan Blok F di kawasan Paskal Hyper Square Bandung.

"Sehingga perlu pendanaan dan juga untuk mengenalkan perseroan kepada masyarakat dan supaya Citra Buana Prasida dikenal masyarakat Indonesia supaya harga sahamnya baik," ujar Didi dalam Market Review IDX, Jumat (6/1).

Dalam debut pertamanya, saham CBPE menguat 26,7% ke harga Rp190 per saham. Namun, saham CBPE pada menit ke-5 stagnan Rp150 per saham. ● **dot**

FOTO: ANTARA



TARGET PENDATAAN UMKM

Perajin menyelesaikan produksi miniatur lokomotif kereta api di Baros, Cimahi, Jawa Barat, Jumat (6/1). Kementerian Koperasi dan UKM mendorong ketersediaan data UMKM berdasarkan nama dan alamat dengan target pendataan sebanyak 36 juta pelaku UMKM pada Tahun 2023.



BPR SUPRA

PULAUINTAN

General Contractor



PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA

Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Cadangan Devisa RI 2022 Capai US\$137,2 Miliar

JAKARTA (IM) - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai US\$137,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2022 sebesar US\$134 miliar.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman pemerintah.

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Erwin, Jumat (6/1).

Dikutip dari *Antara*, BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, bank sentral memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan

dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun atau 115,6 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun dan naik 34,3 persen (yoy) dari Rp1.278,6 triliun.

"Kita lihat dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa. Pada 2021 tumbuh 19,3 persen, sedangkan 2022 tumbuh 34,3 persen," katanya dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta, Selasa (3/1) lalu.

Penerimaan pajak yang melampaui target tersebut didorong oleh komponen pajak yang hampir seluruhnya juga melampaui target yakni PPh nonmigas, PPN dan PPNBM, serta PPh migas.

Secara rinci, penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp920,4 triliun atau 122,9 persen dari target dan mampu tumbuh 43 persen (yoy) sedangkan PPh migas sebesar Rp77,8 triliun yang merupakan 120,4 persen dari target dan mampu tumbuh 47,3 persen (yoy). ● **pan**

Pemerintah Lanjutkan Kartu Prakerja 2023 dengan Skema Normal

JAKARTA (IM) - Sebagai salah satu upaya strategis Pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, Program Kartu Prakerja saat ini telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat.

Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022 lalu juga mendorong Pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

"Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022," ungkap Airlangga dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Jumat (6/2).

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia's Critical Occupation List, Indonesia's Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum "Future Job Report", serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Ke depannya, Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yang telah ditentukan.

"Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia," kata Airlangga. ● **dot**